

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak alasan anak melakukan perbuatan melanggar hukum karena disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, lingkungan maupun dampak perkembangan teknologi. Bahkan anak pun menjadi pelaku pelanggaran hukum. Hal ini dikarenakan, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya sehingga dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya, diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, patut dijunjung

tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Berkaitan dengan kedudukan anak memiliki kedudukan dan peran yang strategis, maka negara pun menjamin di dalam konstitusi tentang hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹Upaya bersama diperlukan dalam memperhatikan kepentingan anak, sehingga tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan jahat yang merugikan pihak lain.

Sampai sekarang banyak ditemukan anak yang melakukan pelanggaran hukum dalam kehidupan sehari-hari tetapi masih terdapat kekurangan dan kelemahan mengenai perlindungan hak-hak anak (khususnya sebagai pelaku) dalam proses penegakan hukumnya. Pihak-pihak yang masih mengabaikan hak-hak anak seharusnya mereka dapatkan, serta

¹Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

memperlakukan anak secara tidak manusiawi. Saat ini ada pihak yang juga memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi semata, tanpa menghiraukan bahwa atas perbuatannya dapat menghalangi hak-hak anak tersebut. Kondisi demikian, maka anak disebut sebagai “anak yang berkonflik dengan hukum” (*Children conflict with the law*). Anak yang berkonflik dengan hukum dapat diartikan sebagai anak yang disangka, dituduh atau diakui telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Anak bukanlah untuk di hukum, melainkan untuk dibina dan dibimbing agar mampu menjadi manusia yang utuh, cerdas dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa di masa akan datang. Anak terkadang mendapati situasi atau keadaan sulit mendorong anak melakukan perbuatan melanggar nilai-nilai hukum, agama, kesopanan dan kesusilaan. Anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum terlebih kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Perlu pertimbangan yang kuat saat memasukan anak ke dalam penjara karena akan berdampak buruk kepada keadaan mental dan kepribadian anak.

Perkembangan anak menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh karena itu negara sebagai tempat berlindung warganya harus dapat memberikan regulasi jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak. Keadilan harus diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Diantaranya adalah dalam proses peradilan pelaku tindak pidana anak, perhatian tersebut tidak hanya dari ahli hukum (pidana) tetapi juga pada masyarakat dan pemerintah yang ikut serta dalam hal ini. Perhatian pemerintah Indonesia yang cukup

besar dalam hal perlindungan anak diwujudkan dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini merupakan perubahan dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena undang-undang yang lama dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat baik dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Undang-undang ini juga belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa undang-undang ini berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan (Agustus 2012) sehingga konsekuensi yuridisnya masih diberlakukan undang-undang yang lama sebagai dasar hukum pengadilan anak, yaitu UU No.3 Tahun 1997. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat menyadari perlunya perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana agar anak tidak mengalami tekanan jiwa dan pengaruh buruk bagi masa depan serta perkembangan kepribadiannya.

Aspek hukum perlindungan anak perlu diperhatikan karena perlindungan hukum terhadap anak dan peradilan pidana anak merupakan salah satu cara melindungi anak dalam pertumbuhannya di masa depan. Perlindungan hukum mengandung pengertian perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Ketentuan khusus mengatur masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembentukan undang-undang tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum harus diterima sebagai fakta sosial, namun diupayakan anak tidak harus bersentuhan langsung dengan peradilan.

Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari Penyidikan, Penuntutan, Pengadilan dan menjalankan putusan Pengadilan, di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi rendah.

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum janganlah sampai memunculkan *stigmatisasi* atau *labeling*, karena akan berdampak besar dalam kelangsungan hidup masa depan anak. Putusan hakim menjatuhkan sanksi tindakan atau pidana dalam persidangan anak harus berdasarkan atas rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Hakim harus yakin bahwa putusan yang diambil dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga bertanggung jawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus

diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Menurut Bagir Manan, selama dalam proses persidangan, anak harus didampingi oleh advokat². Anak-anak memiliki hak-hak yang harus dijaga dan dilindungi, seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuhnya pada saat pemeriksaan berlangsung. Hak dan kewajiban pada anak tetaplah berbeda dengan hak dan kewajiban orang dewasa. Anak lebih harus mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan yang khusus.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam perkara pidana, terutama hak pemberian bantuan hukum, dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan maka secara otomatis bagi para penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa, orang tua/wali/orang tua asuh mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum tersebut.³

Anak melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku juga dapat dikatakan sebagai korban. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak terkait, karena anak

²Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung , PT.Revika Aditama, Hlm. 67

³Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita selekta hukum pidana, Kriminologi & Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, Hlm. 72

melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum, hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi, hak atas Hukum Acara Peradilan Anak, hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyatakan bahwa, “Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”. Pasal 23 ayat (1), menyatakan bahwa “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Kedua undang-undang tersebut, mengatur adanya kewajiban terhadap tersangka/terdakwa anak didampingi Penasehat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.

Pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, juga sebenarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Penanganan perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik

bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Salah satu hak yang seharusnya didapatkan terhadap anak nakal ialah hak untuk didampingi oleh penasehat hukum baik dari penyidikan bahkan sampai kepersidangan, sebab keadaan persidangan berbeda antar terdakwa yang sudah dewasa dengan perkara anak selama persidangan digelar.

Pengadilan anak menghendaki terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuh dan pembimbing kemasyarakatan. Mereka memiliki peranan masing-masing, untuk penasehat hukum/advokat mempunyai kedudukan yang berbeda dengan orang tua, wali atau pembimbing kemasyarakatan. Penasehat hukum atau advokat mempunyai fungsi membela kepentingan hukum terdakwa/anak nakal dipersidangan juga berperan aktif dalam rangka mengungkapkan kebenaran materiil terhadap perkara yang dihadapi oleh terdakwa/anak nakal. Rumusan Undang-undang SPPA yang menyatakan anak berhak wajib memperoleh bantuan hukum.

Kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak yang salah satunya hak untuk memperoleh bantuan hukum maka tidak akan lepas dengan peran Advokat. Advokat berprofesi memberi jasa bantuan hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya. Regulasi sudah ada, tetapi dalam kenyataannya masih minim perlindungan terhadap anak. Faktor aparat penegak hukum masih belum memahami secara baik tentang bagaimana proses perkara anak tersebut yang masih menjadi persoalan perlu dituntaskan.

Peran Advokat tidak hanya menyelesaikan persoalan atau pertentangan antar individu atau badan hukum saja. Advokat juga berperan sebagai media penghubung antara masyarakat dengan penguasa atau juga antara warga negara dengan negara. Advokat berperan memberi kepastian bahwa anak yang sedang berhadapan dengan hukum itu dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Peran tersebut dalam praktiknya masih bersifat formalitas saja, karena masih ada hak-hak anak belum terpenuhi, artinya masih perlu adanya kajian dan evaluasi terhadap kinerja dan peran advokat untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Alasan dipilihnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo sebagai tempat pengambilan populasi dalam penelitian ini karena di wilayah ini cukup banyak kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Misalnya seperti :

“Kasus dua pelaku pemerkosaan pelajar di bawah umur di Probolinggo berhasil diamankan. Pelaku MR (15) dan F (15) diamankan polisi kurang dari 24 jam di lokasi berbeda. MR diamankan di museum Kota Probolinggo dan F diamankan di rumahnya kawasan pesisir. Dengan penangkapan remaja yang masih berstatus pelajar ini, polisi masih memburu 2 pelaku lainnya. Menurut Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, AKP Suwancono dari pengakuan dua pelaku yang berhasil diamankan, mereka sudah merencanakan pemerkosaan terhadap korban sebelumnya. "Dua pelaku berhasil kita tangkap dan salah satu pelaku merupakan pacar korban dan mengajak korban ke rumah temannya langsung diberi pil koplo. Korban langsung diperkosa. Selain itu, korban juga diperkosa pelaku lainnya di makam cina kota setempat," jelas Suwancono, Rabu (22/2/2017). Peristiwa itu bermula saat salah satu pelaku MR, kekasih korban, menjemput korban di rumahnya, untuk diajak jalan-jalan

kerumah temannya yakni, T di Desa Banjar Sari. Di rumah tersebut, korban dipaksa menelan 5 pil koplo⁴.

Setelah korban tak sadarkan diri, pelaku MR melakukan perbuatan tak senonoh. Setelah puas melampiaskan nafsu bejatnya, korban langsung diantar pulang oleh F. Namun di tengah perjalanan, pelaku F melakukan pemerkosaan terhadap korban dan ditinggal di lokasi. Beruntung, korban ditemukan warga setempat. Kini kedua pelaku dijebloskan ke tahanan mapolres setempat untuk menjalani proses hukum. Mereka dikenakan pasal 228 subsider 332 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 sampai 9 tahun penjara. Dari hal ini diharapkan dapat diperoleh data yang akurat tentang masalah penerapan perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana⁵”.

Dengan adanya penelitian ini, besar pula harapan penulis akan terciptanya artikel ilmiah yang dapat memberi sumbangsih positif terhadap jalannya penegakan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Terciptanya nuansa hukum yang sesuai dengan apa yang seharusnya bukan yang senyatanya terjadi dalam masyarakat. Hukum yang mengedepankan unsur keadilan, kemanfaatan, tanpa mengesampingkan aspek kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka untuk menelaah dan meneliti pokok masalah tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo mampu menjamin perlindungan anak dari tindakan diskriminasi para penegak Hukum?

⁴Mochamad Solehudin, *Dua pelaku pemerkosaan pelajar di Probolinggo berhasil ditangkap* diakses. news.detik.com. tanggal 09-05-2017 Pukul 21:26 WIB

⁵*Ibid*

2. Faktor–faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum bagi Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo?
3. Bagaimana upaya Peningkatan Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum Bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo mampu menjamin perlindungan anak dari tindakan diskriminasi para penegak Hukum.
2. Mengetahui dan menganalisis Faktor–faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum bagi Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo
3. Mengetahui dan menganalisis upaya Peningkatan Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum Bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat

- a. Penelitian hukum ini sebagai syarat penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

2. Kegunaan

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Pidana dan ilmu Hukum Acara Pidana dalam hal implementasi perlindungan hak-hak anak terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan bantuan hukumnya.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak penyidik, penuntut umum, pengadilan ,advokat, dan masyarakat luas.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Sosio-Legal atau penelitian hukum non doktrinal yaitu dengan mengkonstruksikan hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri yang menekankan pada pencarian-pencarian, kejajegan-kejajegan

empiris dengan konsekuensi selain mengacu pada hukum tertulis juga mengadakan observasi terhadap tingkah laku yang benar-benar terjadi.⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di:

- a. Pengadilan Negeri Kota Probolinggo Jalan Dr. Mohammad Saleh, No. 26, Kota Probolinggo, Jawa Timur.
- b. Kantor Advokat Anan Husaini, SH & Rekan Jalan Mastrip Gg. Kelapa Gading No 29 Kota Probonggo
- c. Kantor Advokat Putut Gunawarman, SH.MH Jalan Imam Bonjol No 25 Kota Probolinggo
- d. Kantor Advokat Hasmoko, SH. MH Jalan Cokroaminoto No 61 Kota Probolinggo

Sumber Data

- a. Sumber data primer

Data primer penulis adalah data yang sesuai dengan pemberian bantuan hukum bagi ABH dari Tahun 2011-2016 di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo.

- b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 11

- b. UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak
- c. UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak
perubahan dari UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan
Anak,
- d. Literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*) ;

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada:

1. Pihak Pengadilan Negeri Kota Probolinggo.

- a. Nama : Sylvia Yudhiastika, SH., MH.,

NIP : 19830119 200604 2 003

Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Kota Probolinggo

2. Kantor Advokat.

- b. Nama : Anan Husaini, SH

Jabatan : Anggota IKADIN Kota Probolinggo

3. Kantor Advokat.

- c. Nama : Putut Gunawarman SH, MH

Jabatan : Dosen UPM

4. Kantor Advokat.

- d. Nama : Hasmoko, SH, MH

Jabatan : Anggota IKADIN Kota Probolinggo

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini penulis mengumpulkan rekapitulasi perkara serta data ABH dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo.

d. Studi Kepustakaan

- a. Manual, yaitu buku-buku cetak yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti
- b. Digital, yaitu browsing internet yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti

5. Metode Analisis Data

Penulisan ini menggunakan metode Analisa Deskriptif terhadap Data Kualitatif yaitu penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi sesuai permasalahan hukum, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang tersusun secara berurutan. Mulai BAB I sampai BAB IV, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada BAB ini menguraikan mengenai Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB ini berisi mengenai Tinjauan Pustaka terdiri dari tinjauan umum tentang Anak, tinjauan umum tentang bantuan hukum menurut undang-undang No. 18 Tahun 2003 Advokat, tinjauan umum undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tinjauan umum tentang bantuan Hukum, tinjauan umum tentang Advokasi Anak, aspek hukum perlindungan anak, prinsip-prinsip perlindungan anak, Hak ABH dalam proses peradilan, tinjauan umum tentang anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini menjelaskan dan memaparkan bahan hukum hasil penulisan hukum serta analisa bahan hukum penulisan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan pada teori dan kajian pustaka yaitu yang pertama pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum terhadap ABH di Wilayah Hukum Kota Probolinggo mampi menjamin anak dari tindakan diskriminasi para penegak huku, yang kedua faktor –faktor yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum bagi ABH di Wilayah Hukum Kota Probolinggo, yang ketiga upaya peningkatan pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum bagi ABH di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo

BAB IV: PENUTUP

Pada BAB ini berisi tentang kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua dan bab ketiga yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia terutama dalam bidang hukum pidana serta adanya daftar pustaka yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan penulisan hukum nantinya.

